

REPOSISI DAN PROFESIONALISME MILITER

DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU SYARI'AH**

DISUSUN OLEH:

**M. HISYAM
01370783**

DI BAWAH BIMBINGAN

**DRS. RIZAL QOSIM, M.Si
HJ. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2006

ABTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sejarah dunia tercatat sebagai Negara pertama yang memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa asing, kemerdekaan itu tidak terlepas dari peran aktif Tentara Republik Indonesia (TRI) yang dalam perkembangannya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1947, dalam sejarah bangsa Indonesia peran TNI sangat vital, karena TNI mengemban tugas berat yaitu menjaga keamanan negara. Dalam sejarah perkembangan TNI dari mulai berdirinya TNI sampai sekarang mengalami metamorfose yang menarik untuk dicermati dari mulai tugas sebagai penjaga keamanan Negara sampai pada peran aktif TNI dalam institusi Negara itu sendiri, peran dan fungsi inilah yang sampai sekarang masih dipertanyakan, apakah militer sebagai pertahan Negara dan pengamanan untuk keutuhan NKRI atau militer sebagai pemegang kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang profesionalisme militer di Indonesia dalam mengembalikan peran dan fungsi militer sebagai alat pertahanan Negara. Selama Orde Baru peran, fungsi Militer benar-benar berubah menjadi alat yang sangat hegemoni dan represif, dan militer berperan ganda sehingga militer tidak lagi menjalankan profesionalismenya. Baik di wilayah ekonomi, politik, sosial, budaya dan adanya intervensi militer ke domain sipil. Maka kerangka teoritik skripsi ini bahwa dalam Islam sendiri mengharuskan dalam dunia kemiliteran untuk betul-betul profesional. Al-mawardi menyebutkan dalam Islam telah ada mekanisme formal (*qaidah askariyah*) yang mengatur khusus tentang profesionalitas dan keseimbangan kontribusi (gaji) sebagai sinergitas dan meminimalisir intervensi ke domain politik, sosial, budaya. Dan sumber hukum yang menjadikan landasan bagi Undang-undang militer, tentang profesionalisme haruslah betul-betul dibumikan sebagai alat pertahanan Negara. Era reformasi 1998 peran, fungsi militer mulai dipertanyakan kembali militer apakah militer sebagai penjaga keamanan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing atau militer sebagai pemegang kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Era Gus Dur adanya pemisahan TNI dan POLRI melalui TAP/MPR/Nomor VII/MPR/2000.

Dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis dan politik bisa diteliti sejauh mana peran, fungsi militer dalam struktur NKRI, sehingga dengan menggunakan pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa militer di Indonesiaa masih sangatlah jauh dan tidak sesuai norma-norma dan sistem *al-fiqh as-siyasiy*, karena Islam mengajarkan militer untuk lebih profesional. Profesionalisme TNI di Indonesia belum terlaksana sebagai alat pertahanan Negara dan pelindung kedaulatan-integritas NKRI, karena itu kesejahteraan TNI harus ditingkatkan agar menjadi keseimbangan guna menciptakan tentara yang lebih profesional dan mampu menjalankan peran dan fungsi TNI dalam mewujudkan kedaulatan dan mempertahankan integritas Bangsa dan Negara.

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara

M.Hisyam

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : M. Hisyam
NIM : 01370783
Judul Skripsi : *Reposisi dan Profesionalisme Militer di Indonesia
Perspektif Fiqh Siyasah*

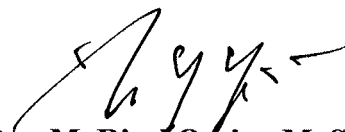
Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas SYARI'AH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara M. Hisyam dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2006 M
8 Ramadhan 1427 H

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
NIP. 150256649

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara

M.Hisyam
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : M. Hisyam
NIM : 01370783
Judul Skripsi : *Reposisi dan Profesionalisme Militer di Indonesia
Perspektif Fiqh Siyasah*

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas SYARI'AH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara M. Hisyam dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2006 M
22 Ramadhan 1427 H

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

REPOSISI DAN PROFESIONALISME MILITER DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Yang disusun oleh :

M. HISYAM
NIM : 01370783

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 22 November 2006 M / 01 Zulqa'dah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 08 Zulqa'dah 1427 H
29 November 2006 M


DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP : 150300639

Sekretaris Sidang


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP : 150300639

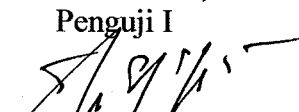
Pembimbing I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP : 150256649

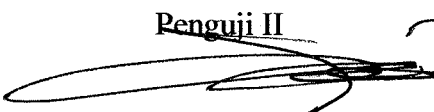
Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP : 150277618

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP : 150256649

Penguji II


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP : 150276308

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة
عدة

Ditulis

Muta'addidah

Ditulis

'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة
علة

ditulis

Hikmah

Ditulis

'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

Ditulis

Karâmah al-auliyâ'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسَرَ		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْتَسِي	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

A. السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

**BESI YANG BAIK TIDAK DIBIKIN PAKU...!!!
MANUSIA YANG BAIK TIDAK JADI SERDADU**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kampus Putih UIN SU-KA Jogjakarta

Bapak (Koid Rosyadi) dan Ibu (Siti Namiroh)

Keluarga saya, adikku Ilham, Prepti atas doa dan Ridhanya,,,, Guru-guruku Yang khlas Mendidikku : pak rizal, ibu Fatma yang telah menjadi pembimbing skripsiku dan tidak lupa pak Mahrus, pak Yani, pak Yudian, pak Oktoberiansyah sekaligus sebagai guru Mabincab PMII jogjakarta ,,, salam ta'dhim saya.. dan bt kluarga besar Kweni: Ayah, Mami, Vita, Iza, Bara, Jeha, yang tidak henti-hentinya kasih pelajaran hidup yang amat besar. Kepada snior-snior ku di PMII mas jeki, Siwa, rohim, kun... Special bt dulur-dulurku (**RAKJAT FEODAL**) : Arya sofi, teko, muis gd, indar parawangsa, muis clk, temin, kang armen, emon, kaji aul, dido, ava bronto, boim, said, rifqi, jaka awin, dul hadi, robot, oiem, warnoto, zain, blak dll. gendu'-2 ku : ipeh, uut, yuyun, iis, aida, qo2m, aliah, oelvi, dan semua semua keluarga PMII Syari'ah 01. 02, 03 (**ANAK RÉZIM**) sepurane sing katah dan atas kebaikan dan semangat perjuangan nya, aku takan lelah belajar menghormati kalian... **"Aku Pilih Hidup Yang Tidak Kekal"**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين واصحابه اجمعين.

Segala puji dan syukur bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi “*Reposisi dan Profesionalisme Militer di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa*h.” ini dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi setidaknya, skripsi ini sedikit mencoba mengartikulasikan atas segala hal selama studi di Jurusan JINAYAH SIYASAH (*Pidana dan Politik Islam*). Segala kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini.

Kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat M.Hum dan Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan JS.

3. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, selaku pembimbing I, dan sekaligus Senior diskusi dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya.
4. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini, dan tetap menjadi Srikandi....
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penyusun ucapkan terima-kasih pula pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai TU Syriah maaf ya bu..
6. Seluruh keluarga berkat kasih-sayangnnya benar-benar memahami kemauan saya, terkhusus Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan Ridha dan ikhlasnya, demi proses Studi ananda hingga akhir. Untuk adikku: Ilham, Prepti dan smua pak de', Bude', Pak Lik', Bu Lik' sepupu ku dan semua saudara-saudara ku di rumah dan Ikatan Keluarga Besar Abdul Latief (*IKHAL*).
7. Keluarga Besar Kweni: Ayah, Mami, Vita, Iza, Bara, Jeha, yang tidak henti-hentinya kasih pelajaran hidup yang amat besar. Kepada senior-sniorku di PMII mas jeki, Siwa, rohim, kun. Spesial bt Dulur-dulurku

RAKJAT FEODAL : Arya Sofi, Teko, Muis gd, Indar Parawangsa, Muis clk, Temin, Kang Armen, Emon, kaji Aul, Dido, Ava Bronto, Boim, Said, Rifqi, Jaka Awin, dul Hadi, Robot, Oiem, dan Gendu'-2 ku : Ipeh, Uut, Yu2n, Iis, Aida, Qo2m, Aliah, Oelvi, dan semua semua keluarga PMII Syari'ah 01. 02, 03, 04. dll (**ANAK-2 REZIM**) dan keluarga **HIMABU** Sepurane sing katah. Atas kebaikan dan semangat perjuangan nya, aku takan lelah belajar menghormati kalian....

8. Sahabat-sahabat "Senat Mahasiswa Universitas" di Lembaga SMA-U UIN Sunan Kalijaga, sahabat-sahabat diskusi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), teman-teman kelas JS-2 '01 yang banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir, dan mereka yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu di sini. Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 September 2006 M
Penyusun



M. Hisyam
01370783

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN MILITER DI INDONESIA	
A. Kelahiran Militer di Indonesia.....	16
B. Militer Pada Masa Orde Baru: Dwifungsi ABRI sebagai Legitimasi.....	25
• Militer dan Pelanggaran HAM	33
C. Militer di Era Reformasi	36

BAB III MILITER DALAM ISLAM

A. Jihad Sebagai Hukum Perang	42
• Perang dan Damai dalam Dakwah Rasul. SAW.....	46
B. Peran dan Fungsi Militer dalam Islam.....	51
• Militer sebagai Dokumen Khusus Negara.....	53

BAB IV REPOSISI DAN PROFESIONALISME MILITER DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASYAH

A. Strategi Militer Sebagai Alat Pertahanan Negara	59
B. Militer Sebagai Bagian dari Masyarakat Sipil	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

- 1. Curriculum Vitae**
- 2. Terjemahan**
- 3. Daftar Singkatan**
- 4. Struktur Teritorial Organisasi HANKAM**
- 5. Struktur Pembinaan Kekaryaan ABRI**
- 6. Peta Kekuatan Politik Pada Masa Awal Orde Baru**
- 7. Struktur Pemerintahan Yang Disederhanakan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi Nasional Indonesia yang didorong oleh semangat untuk menata kembali kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik, telah cukup menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah rezim orde otoritarian runtuh, tahun 1998 yang merupakan gelombang reformasi, belum memperlihatkan hasil prima dan signifikan, yaitu mengembalikan kedaulatan sipil (*people suvergenity*) dan menjadikan militer lebih profesional (*profesionalisme milliter*) dengan cara mengembalikan peran dan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara (*reposisi militer*)¹, dan sebagai salah satu tonggak keberhasilan dari tujuan reformasi.

Perubahan tersebut telah ditindak lanjuti antara lain melalui penataan kembali kelembagaan dan dalam bidang struktur yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan, kondisi lingkungan dan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan, berimplikasi pula terhadap pemisahan peran, fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam hal ini reposisi dan profesionalisme militer di Indonesia, dan perlunya penyegaran, penataan kembali sehingga dapat menyebabkan adanya aturan dan fungsi yang lebih professional dari masing-masing institusi tersebut.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP/MPR) Nomor VI/MPR/2000, tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

¹ Jurnal Advokasi, "Militer diambang Kuasa", edisi No. 10 Oktober Tahun 2004, hlm. 3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia², dan TAP MPR tentang peran (TNI) dan peran POLRI³, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu Undang-undang yang mengatur tentang militer di Indonesia, khususnya TNI. oleh karna itu tidak akan memperpanjang persoalan tentang militer, akan tapi berdasar TAP MPR/No VI/MPR/2000 bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mewujudkan TNI betul-betul menjadi profesional.

Dengan kondisi yang sangat mendasar, bahwa masa orde baru, peran dan fungsi tentara di Indonesia sangatlah dominatif, yang artinya disamping menjalankan peran, fungsinya sebagai alat pertahanan negara, yang dalam tugasnya berdasar pada kebijakan dan keputusan politik negara, tapi juga berperan dan berfungsi sebagai aktor politik praktis. Sehingga hal ini menyediakan, kesempatan yang cukup besar bagi TNI untuk mengintervensi terhadap sipil disetiap level,⁴ dan juga selalu menaruh kekuatan militernya di panggung kekuasaan.

Maka dari itu pasca reformasi inilah yang sangat signifikan dan berharap dapat merubah dan memperbaiki ketatanegaraan dan sistem negara agar bisa mewujudkan negara yang adil dan makmur. seiring dengan era reformasi yang merupakan masa terbukanya kembali kran demokrasi di Indonesia, maka pada masa pemerintahan Abdurrahman (Gus Dur) sebagai presiden republik Indonesia dan sekaligus sebagai salah satu aktor reformasi 1998, mencoba dan

² Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004

³ Undang-undang Kepolisian Negara RI No. 2 Tahun 2002

⁴ Dwi Pratomo Yulianto, *Militer dan Kekuasaan Puncak-puncak Krisis Hubungan Sipil Militer di Indonesia*, (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 348.

mengeluarkan kebijakan negara tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus mengembalikan peran dan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara agar lebih bisa profesional, dan langkah mereposisi militer.

Reposisi militer menjadi persoalan mendasar yang perlu dituntaskan sebelum melakukan serangkaian kebijakan yang secara langsung berorientasi pada prinsip menegakkan supremasi sipil, reposisi ini berkaitan dengan sejumlah problematika bangsa, dan agenda-agenda yang lain, yaitu bagaimana mendekonstruksi hubungan sipil-militer, ditengah era global dan transisi demokrasi, bagaimana kebijakan diambil untuk mengurangi wilayah dan wewenang militer sekaligus membuat tentara profesional. Yang terpenting adalah bagaimana menutup kemungkinan intervensi militer kedomain sipil.⁵

TNI misalnya, tidak bisa menghindar dari sasaran-sasaran praktis, karena selama ini TNI selalu berposisi tak lebih dan tak jauh dari sekedar instrumen politik kekuasaan rezim otoritarian Suharto, untuk mempertahankan dan memperluas domain di panggung kekuasaannya, terbukti banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah dilakukan militer. Berkait dengan semua aspek yang terjadi, peran-peran secara lebih spesifik, bahwa perubahan politik selama orde baru menunjukkan model administratif dari pembangunan yang menonjolkan formula segi tiga dari para ekonom sebagai penyusun kebijakan, ABRI sebagai stabilisator dan birokrasi sebagai pelaksanaannya.

⁵ Khamami Zadda, *Neraca Gusdur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta : LAKPESDAM, 1997), hlm. 91.

SRTUKTUR BIROKRASI MILITER YANG BERPOLA
DOMINAN TERHADAP BIROKRASI SIPIL

JENJANG BIROKRASI	DEPHANKAM	DEPDAGRI
1. Propinsi	Komandan Kodam (Kepala staf)	Gubernur
- Operasional	Territorial (Korem)	(Residen)
- Brigade	(Seskoad) (komandan) (kepala staf)	
2. Kabupaten	Kodim (Komandan) Batalyon	Bupati (Sekwilda)
3. Kecamatan	Koramail	Camat
4. Desa	Bapinsa	Lurah

Sumber :david jenkins ; 1987, 124.⁶

Dengan demikian, tampak bahwa kaum politik- birokrasi- militer berdiri sebagai kekuatan politik yang independent, yang juga punya kepentingan – kepentingan sosial-politik dan ekonomi sendiri yang timbul dari kekuasaan dalam aparatus Negara yang mereka kuasai

⁶ Iswandi , *Bisnis Militer Orde Baru*, (Yogyakarta: ROSDA, 2000), hlm. 5.

Disamping itu juga tentara selalu menggunakan kekerasan-kekerasan sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Terbukti jelas banyaknya kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Yang telah dilakukan oleh militer, ini merupakan konsekuensi dari posisi militer yang turut serta dalam melanggengkan sistem orde otoritarian Suharto dengan cara menggunakan tindakan-tindakan repesif.

Tak pelak lagi bahwa sekitar tahun 1996-an, memang pantas disebut sebagai tahun kekerasan, rentetan kekerasan yang dimulai dari kasus Makasar berdarah di Sulawesi Selatan, kasus 27 juni di Jakarta, hingga pengrusakan-pengrusakan di berbagai wilayah. Bahkan rangkaian kerusakan itu berlanjut sampai bulan keempat tahun 1997 di daerah pekalongan.⁷ Pemerksaan, pembantaian, penculikan, penjarahan dan sampai pada konflik agama, suku dan ras. Semua berada dalam sebuah bencana, tragedi bangsa Indonesia. Belum peristiwa yang lain; peristiwa priok 1984, lampung talang 1989, Dom di Aceh 1989, tragedi di Ambon pada tahun 1999, hingga peristiwa Maluku tahun 2000.⁸ Kekerasan yang terjadi bukan hanya bermaksud sebagai kekerasan personal yang ditujukan pada fisik saja, akan tapi kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan structural.⁹

Sejalan dengan paradigma baru militer, yang mengakhiri peran sosial-politik militer dan mengembangkan peran dan fungsi TNI ke dalam

⁷ 1996 Tahun Kekerasan; Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, (Jakarta: YLBHI, 1997), hlm. V

⁸ Al-Chaidar, Tim Peduli Tapol, Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslim*, cet. V (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), hlm. 7

⁹ 1996 Tahun Kekerasan, hlm. V.

kompetensinya, intinya sebagai alat pertahanan negara, maka diperlukan aturan yang lebih kontekstual, sehingga mampu meningkatkan profesionalitas TNI.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah tentang Profesionalisme Militer di Indonesia?.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

- A. Mendeskripsikan pandangan fiqh siyasah tentang profesionalisme militer di Indonesia.

2. Kegunaan

- A. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu sumbangan sederhana untuk membuka cakrawala baru tentang posisi, peran, dan fungsi militer di Indonesia
- B. Penelitian dapat memperkaya referensi kepustakaan, khususnya memberikan pemahaman baru pada masyarakat tentang militer di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis yang mengupas perihal militer memang sangatlah banyak. Dari tulisan-tulisan bebas, skripsi dan majalah, dan telah di susun untuk keperluan pengkajian hal tersebut. Beberapa buku yang sudah beredar, diantaranya adalah “Kedudukan Militer Dalam Islam dan Peranannya pada Masa

Rasulullah SAW”, yang di tulis oleh Debby M Nasution.¹⁰ yang membahas tentang peran dan kedudukan militer dalam pandangan Islam dan menampilkan suri tauladan kehidupan Rasulullah SAW, sebagai seorang utusan yang menjadi kepala negara sekaligus sebagai komandan negara (Panglima).

Buku lainnya yang di tulis Dwi Pratomo Yulianto “Militer dan Kekuasaan”,¹¹ buku ini mengupas secara rinci tentang konflik-konflik kekuasaan. Antara pihak militer dan pemegang kekuasaan yang terjadi di Indonesia sepanjang perang kemerdekaan pada awal tahun 1950-an sampai akhir 1980-an konflik yang muncul ketika salah satu pihak merasa pihak lain melakukan intervensi terhadap urusan internal, dalam hal ini mampukah pihak sipil-militer dapat duduk bareng dalam konteks relasi sipil-militer untuk membicarakan batas teritorial otoritas mereka dalam sistem kenegaraan, dan saling bisa menghormati.

Abdurrahman Wahid dan kawan-kawannya juga menuliskan dalam bukunya “berpolitik atau kembali ke barak”.¹² Yang berisi wacana masyarakat madani dalam menyelesaikan diskursus tentang masyarakat global yang mengarah pada pembentukan peran militer dalam politik dan sebaliknya, dapat memberikan tempat yang proposional pada peran masyarakat sipil.

Dan juga buku yang berjudul “Bisnis Militer Orde Baru”, yang di tulis oleh Iswandi.¹³ Buku ini berisikan tentang peran militer pada umumnya berkaitan

¹⁰ Debby M Nasution, *Kedudukan militer dalam Islam dan peranannya pada masa Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)

¹¹ Dwi pratomo yulianto “*Militer dan Kekuasaan*”, puncak-puncak krisis hubungan sipil militer di Indonesia, (Yogyakarta: Narasi, 2005)

¹² Abdurrahman Wahid,dkk, *Berpolitik Atau Kembali Ke Barak Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Bigraf, 1999)

¹³ Iswandi, *Bisnis militer orde baru*, (Yogyakarta: Rosda, 2000)

dengan ospek pertahanan dan keamanan di sebuah negara, tapi dalam kasus di Indonesia peran tersebut ke bidang sosial-politik, ekonomi dengan dalih dan mendapat legitimasi lewat doktrin Dwi Fungsi ABRI yang menjadikan dominan dan represif. Sejak itulah militer menguasai posisi strategis di setiap level.

“Hegemoni Tentara” yang ditulis M.Najib Asca.¹⁴ mengupas tentang masalah konsep Dwi fungsi ABRI di salah artikan sehingga selalu dijadikan legitimasi formal dan terstruktur.

Skripsi yang ditulis oleh Nurcholis, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Pendidikan Militer di Akademi Militer Magelang, dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pendidikan militer yang ada di AKMIL Magelang, dari perspektif Islam.¹⁵

Dari beberapa buku yang kami catat di atas, sedikit banyak mengupas tentang militer secara global dengan realitas dan kejadian kekerasan, tragedi hal ini sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan intervensi militer di domain sipil, sedang sebenarnya salah satu tujuan murni reformasi adalah relasi antara sipil-militer dapat sinergis dan proporsional. Oleh sebab itu skripsi yang berjudul Reposisi dan Profesionalitas Militer di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah, belum ditemukan.

¹⁴ M.Najib Asca, *Hegemoni tentara*, (Yogyakarta: LKIS, 1998)

¹⁵ Nurcholis, “yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap sistem Pendidikan Militer di Akademi Militer Magelang”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah, tidak diterbitkan, 2000)

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum utama di dalam Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, setelah keduanya adalah Ijma' dan Qiyas. Selain keempat sumber pokok tersebut dalam ilmu sunah fiqh masih terdapat sumber lain yang bisa dipakai sebagai dalil dan tempat mengambil keputusan hukum. Yakni Al-Istihsan, al Maslahah al-Mursalah,. Al Urf, dan Al Istishab.¹⁵

Sebagai fondasi, Memahami pelajaran kehidupan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang teguh menentang peperangan dan Rasulullah selalu menentukan kemurahan hatinya. Pada masa Rasulullah SAW, bahwa peran dan fungsi kemiliteran sangatlah terbatas pada sebagai alat untuk melakukan tugas dalam bidang pertahanan sebuah Negara. Juga perluasan wilayah untuk memerangi kedzaliman dan syiar Islam, karenanya peran dan fungsi militer berlandaskan pada prinsip-prinsip yang di bangun melalui fondasi agama islam untuk melatih diri dan mengadakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar.

Masa kejayaan islam sistem ketatanegaraan sangatlah diprioritaskan sebagai wujud kemaslahatan ummat yang bersifat esensial, yaitu praksis-operasional. Selain itu sebagai tentara atau militer dalam Islam juga dituntut untuk mempunyai wilayah yang itu menjadi alat pertahanan perang, perdamaian, dan syi'ar islam. Disamping itu juga kemiliteran islam harus mempunyai moralitas yang tinggi sesuai keluhuran profesi yang dimilikinya. Yang mengacu pada keihklasan, kejujuran dan ketaqwaan.

¹⁵ Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 18.:

Sebab selain peran dan fungsinya sebagai pertahananann Negara dan menumpas musuh-musuh tetap harus menjunjung tinggi moral, kesadaran atau motivasi yang terdapat didalam hatinya, bahwa peranan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kemiliteran terutama perang semata-mata untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, dan menghancurkan kedzalima serta mensyariatkan hukum dan etikanya, agar kehormatan, kebebasan keamanan dan perdamaian umat manusia di seluruh dunia dapat terpelihara. Al-Quran juga menetapkan dalam filsafat perang Islam, akan pentingnya pendidikan jiwa bagi muslim, dalam mencintai perdamaian dan memperkuat sikap membenci perang. Oleh karena itu Allah SWT berfirman:

و ان جنحوا للسلم فاجنح لها¹⁶

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber hukum yang paling mendasar, dan menjadikan landasan syari'ah bagi undang-undang militer dalam Islam (*qaidah askariyyah*).¹⁷ Tentang profesionalitas militer di Indonesia haruslah betul-betul dibumikan, artinya bahwa peran dan fungsi militer sebagai alat pertahanan negara haruslah dijunjung tinggi terlepas dari setiap persoalan yang selalu menjadi diskursus yang akhirnya timbul pro dan kontra. maka sebenarnya TNI mempunyai domain yang sangat berat sebagai tulang punggung pertahanan negara dan bangsa.

¹⁶ Al-Anfal (8) : 61.

¹⁷ Jamal Yusuf al- khullafat, *Seni Dan Strategi Perang Masa Rasulullah*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002), hlm. 167

Perlu adanya sinergitas dan keseimbangan dalam menjalankan profesionalitas militer antara lain kerja dan upah kerja kemiliteran dalam persoalan ini kesejahteraan yang selama ini sangatlah minim yang diberikan negara. Sehingga tentara selalu mencari lahan lain yang lebih basah.

Islam mengharuskan setiap muslim yang menjadi tentara atau terlihat langsung dalam dunia kemiliteran, untuk menguasai ilmu persenjataan yang sesuai dengan tuntutan zaman termasuk juga cara-cara menggunakannya dengan baik, melalui pendidikan dan latihan sehingga mereka benar-benar menjadi militer yang profesional. dan Islam melarang keras bagi siapa saja yang telah memiliki dan menguasai kemampuan tersebut, kemudian menyia-nyiakannya, keluar dari koridor profesionalitas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

¹⁸ من علم الرمي ثم تركه فليس منا، او فقد عصي

Di dalam kitab *Al-Ahkaam as-Sulthaniyyah* , bahwa dalam kemiliteran Islam telah ada mekanisme formal yang mengatur khusus keseimbangan antara kinerja (profesionalitas) dan kontribusi yang diterima kesejahteraan (gaji). Al Mawardi menjelaskan hal ini dalam dokumen khusus tentang tentara yang mengikat pengukuhan para tentara dan penentuan gaji mereka.

Pengukuhan nama-nama mereka dalam dokumen negara memenuhi tiga syarat; yaitu

1. Sifat-sifat mereka yang membuat mereka berhak dikukuhkan sebagai tentara.

¹⁸ Syarah Muslim juz XIII : 65

2. Sebab yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan penggolongan.
3. Kondisi mereka, karena gaji (kesejahteraan) mereka ditentukan berdasarkan kondisi mereka.¹⁹

Undang-undang Republik Indonesia no.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Bab II pasal 2 dan bab IV tentang peran, fungsi dan tubuh, disebutkan bahwa;

“Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak terbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Serta mengikuti kebijakann politik negara yang menganut prinsip demokratis, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.²⁰

“TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tubuhnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah (*library research*),¹⁹ dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat dalam

¹⁹ Al-Mawardi, *Al Ahkan Assuhnaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul falah, 2000), hlm. 343.

²⁰ Undang- undang TNI No. 34 Tahun 2004. Pasal 5.

²¹ Pasal 6.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

buku, jurnal, majalah, koran dan sumber yang terkait dengan masalah militer di Indonesia.

2. Sifat penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini bersifat *deskriptik-analitik*,²⁰ dengan berusaha memberikan suatu gambaran tentang militer di Indonesia mulai dari latar belakang, atau sejarah mereka, maupun faktor-faktor terkait, dari penelitian ini, nantinya pada akhirnya akan di analisis.

3. Teknik pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam skripsi ini, adalah teknik dokumentasi. Dengan ini penyusunan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan militer di Indonesia dari berbagai buku, jurnal, majalah, dan lain-lain.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan historis-sosiologis dan politik, karena dalam melihat permasalahan profesionalitas yang terjadi dalam tubuh TNI, itu tidak terlepas dari sejarah dan peranan TNI dalam struktur Negara Republik Indonesia sehingga aspek sosiologis juga sangat mempengaruhi karakter profesionalitas yang terjadi dalam tubuh TNI dan peranan TNI dalam wilayah politik juga sangat mempengaruhi eksistensi TNI dalam struktur Negara dan struktur sosial bangsa Indonesia.

5. Analisis Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-2 jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Dalam menganalisis data yang tersedia penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Pola induktif adalah pola penalaran yang bermula dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa umum. Yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya kondisi TNI, dan apa yang melatar belakangi reposisi militer di Indonesia. Dengan demikian akan dapat dianalisa sehingga menghasilkan data-data peristiwa yang bersifat umum.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh skripsi yang sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini kedalam lima bab terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut.

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka bagi bab-bab berikutnya, yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini sangatlah diperlukan guna menghantarkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Bab *Kedua*, mengupas tentang tinjauan umum mengenai militer di Indonesia, yang meliputi asal usul militer (*Historisitas*) dan Militer pada masa Orba sampai perkembangan militer dalam konteks kekinian. Pembahasan ini sangatlah penting karena merupakan konsep dasar yang akan membuka dan memberikan pengetahuan kepada bangsa-negara dalam memahami tentang sejarah Militer, Menjawab dan mengontrol apakah militer itu, dengan posisi, peran

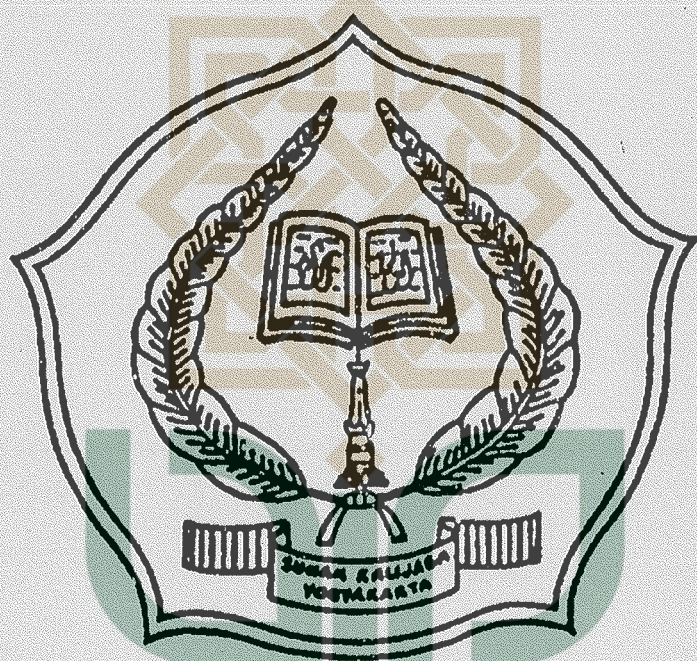
²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* cet. ke-2 (Jogjakarta: Andi Offset, 1998), hlm.42.

serta fungsinya, maka dengan uraian di atas diharapkan akan dapat membuka kesadaran, pengetahuan yang lebih signifikan dan spesifik.

Bab *Ketiga*, berisi tentang historisitas dan profesionalisme militer dalam islam. Dalam hal ini islam pada masa rasulullah SAW, dan mengimplementasikan peran, fungsi dari militer pada masa itu, disamping juga karena Rasulullah SAW adalah tauladan pemimpin negara dan panglima perang.

Bab *Keempat*, merupakan analisis profesionalisme militer di Indonesia menurut Fiqh Siyasah, hal ini melihat aspek urgensi, potensi dan profesionalisme militer di Indonesia menurut Islam. Sehingga dapat dideskripsikan untuk sebuah reposisi, Dan menjawab apakah militer sudah sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara atau menyimpang dari koridor profesionalitas dan membangun militer sebagai bagian masyarakat sipil. Dalam reposisi ini harus disinergisitkan dengan apa yang jadi poin sebuah profesionalisme militer tersebut. Tidaklah mudah dan akan tidak seimbang apabila dalam hal ini militer harus kembali ke basic (*Profesionalitas*) tanpa di barengi kesejahteraan yang lebih (Gaji) untuk kemajuan militer.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan berbagai saran dalam pembahasan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Barbicara tentang Militer sangat erat dengan sistem ketatanegaraan, oleh karena itu Islam pada masa Rosululloh. SAW begitu memperhatikan dan membela kepentingan-kepentingan umat dan agama (Islam). Khususnya nilai-nilai universal Islam yang itu sebagai dasar Rosulullah. SAW untuk menjalankan dan implementasi sebagai tauladan umat Islam, dan berdasar pada kaidah fiqh “*Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah*” upaya untuk menjadikan kebijakan dan hak dasar masyarakat, sekaligus mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu skripsi ini dapat disimpulkan:

1. Menurut pandangan fiqh siyasah tentang militer di Indonesiaa masih sangatlah jauh dan tidak sesuai norma-norma dan sistem *al-fiqh as-siyasiy*, Islam mengajarkan militer untuk lebih professional. Islam sangat menekan peran dan fungsi militer. Profesionalisme TNI di Indonesia belum terlaksana sebagai alat pertahanan Negara dan pelindung kedaulatan-integritas NKRI. Titik awal untuk mewujudkan perubahan dan mereposisi militer. TNI mampu mengakomodasikan peran dan, fungsi khas Ke-angkatan untuk lebih biasa menampilkan jati diri TNI.
2. Karena itu kesejahteraan TNI harus ditingkatkan agar menjadi keseimbangan guna menciptakan tentara yang lebih profesional dan mampu menjalankan peran dan fungsi TNI dalam mewujudkan kedaulatan dan mempertahankan integritas Bangsa dan Negara.

Menbangun kembali hubungan sipil-militer dan tegakan supremasi sipil atas militer untuk sebuah kedaulatan dan integritas bangsa dan Negara.

Bagi militer profesionalisme adalah prasyarat mutlak yang harus dipegang teguh bagi pembentukan alat pertahanan-keamanan negara yang tangguh dan elegan. Keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil-politik dan segala bentuk tugas diluar pertahanan dan keamanan adalah tindakan yang menyalahi Sapta Marga dan sumpah prajurit. Sebagai alat pertahanan-keamanan negara militer harus secara aktif dan penuh tanggung jawab dilakukan dengan semangat Pancasila.

B. Saran-Saran.

Permasalahan yang krusial bagi TNI adalah mewujudkan profesionalitas, oleh karenanya saran dan solusi yang kongkrit adalah

1. Reposisi Militer harus benar-benar dilaksanakan, untuk mengembalikan jati diri militer sebagai alat pertahanan Negara, dan melaksanakan peran dan fungsinya untuk membangun demokrasi NKRI, juga menciptakan harmonisasi relasi militer-sipil.
2. Kesejahteraan Militer harus lebih diperhatikan agar TNI tidak lagi intervensi kedomain sos-pol dan ekonomi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*,
Semarang, CV Asy-Syifa. 1989.

B. Hadist/Ulumul Hadist

Syarah Muslim juz XIII

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Wahab Abdul *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999)
Almawardi *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah "Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
AS. Hikam, Muhammad, Dkk. *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, Jakarta: PB PMII, Cet 1, juli 2000.

D. Lain-lain

Al-Chaidar Tim Peduli Tapol, Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslim di Indonesia 1980-2000*, (Yogyakarta: Wihdah Press 2000)
Center For Information Analysis, Serdadu Memburu Hantu "Ideologi Kewaspadaan" *Disenjagal Kekuasaan Orba*. Jakarta: CIA, cet 1. April 2006.
C. Lebra, Joece. *Tentara Gemblengan Jepang*. Jakarta : pustaka sinar harapan Cet I, 1988.
Cholisin. *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia*. Cet 1juni 2002, Jogjakarta : PT Tiara Wacana 2002.
Fattah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Jogjakarta : LKiS, Cet 1 Oktober 2005.

- Iswandi , *Bisnis Militer Orde Baru*, (Yogyakarta: ROSDA, 2000).
- Jamal, Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002)
- Jurnal Advokasia ,”*Militer Diambang Kuasa*”, edisi No 10 Oktober Tahun 2004.
- Jurnal Pasar Modal Indonesia, No 02/tahun XI, Februari 2000. Jakarta.
- Yahya. Imam, Dkk, “ Militer Islam Klasik : Relasi islam dan militer pada masa nabi hingga khulafaurrasyidun” Jurnal *ISTIQRO’* , vol 3, nomor 01, 2004. Penerbit: direktorat perguruan tinggi agam islam, DEPAG RI
- Khadduri , *War And Peace In The Law Of Islam*. Jogjakarta : Tarawang Press, Cet 1, Desember 2002.
- Zadda, Khamami *Neraca Gusdur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Muhammad Jam Ahmad al , *Perang, Damai Dan Militer Dalam Islam*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, Cet 1, th 1991.
- 1996 “*Tahun Kekerasan*” *Potret Pelanggaran HAM di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1997)
- M.Nasution, Debby, *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya pada Masa Rasulullah SAW*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).
- M. Najib, Azca , *Hegemoni Tentara*, (Yogyakarta: LKIS, 1998).
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Nur, Mufid, dan Nur Fuad. *Bedah Al-Ahkamussulthaniyah: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyyah*. Cet 1. oktober 2000, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Nasution, Ahmad. *Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Panca Orba* jilid3. Jakarta: PT Gunung Agung 1983.
- P Yulianto Dwi, ratomo , *Militer dan Kekuasaan : Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, (Yogyakarta: Narasi, 2005).
- Rahman, Fazalur , Muhammad Sang Panglimaperang : *Filosofi Dan Kebijakan Perang Dalam Islam*, Jogjakarta: TAJIDU PRESS, Cet 2, Oktober 2002.
- Ro Suprpto, Anggo Majid dan Soetopo Satya poetro BSC. *Jatuhnya Soeharto*, Semarang: Yayasan Jurnalistik Indonesia. Cet 1, 17 Agustus 1998.

- Said, Salim. *Genesis Of Power: General Soedirman And The Indonesian Military In Politics 1945-1949*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Seribu Tahun Nusantara*, Cet 1 Januari 2000. Jakarta: Penerbit Harian Kompas Tahun 2000.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, Cet.ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research* cet. ke-2 Jogjakarta: Andi Offset, 1898.
- S Ispandriarno, Lukas, Thomas Hanitzsch. Martin loeffelhoiz. *Media-Militer-Politik: Crisis Communication Perspektif Indonesia Dan Internasional*,
- Said, Salim. *Militer Indonesia Dan Politik: Dulu, Kini Dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cet 2 Maret 2006.
- Tim panel khusus untuk kejahatan serius, *Perintah Penangkapan Wiranto: Kejahatan HAM di Tim-Tim*. Jakarta : Indonesia Human Righhts Institute, cet 1. Mei 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia Tahun 2005.
- Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004
- Wirahadikusumah, Agus. M.P.A. dkk. *Indonesia Baru Dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan, Cet.1 1999.
- Wirasoeminta, Sanusi. *Rengasdengklok: Tentara Peta Dan Proklamasi 17 Agustus 1945*. cet 1 Jogjakarta : Yayasan Pustaka Nusantara 1995.
- Wahid, Abdurrahman, dkk “Berpolitik atau Kembali ke Barak”. *Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: BIGRAF,1999).
- Yusuf Nur, Edy. *Amuk Massa*. Cet 1, februari 2004. Yogyakarta: Alief Press 2004.
- Zon, Fadli. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. cet 2 april 2004. Jakarta : Institute For Policy Studies (IPS).